



SISTEM PEMERINTAHAN ELEKTRONIK



MODUL - Sesi 2

Faktor Resiko dan Faktor Kesuksesan

M Hanif Jusuf ST MKOM

2022



Daftar Isi

DAFTAR ISI	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
PERTEMUAN 1 PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
DAFTAR PUSTAKA	118

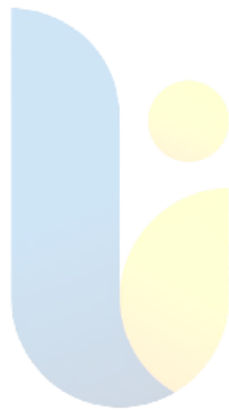


UNIVERSITAS
INABA



DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

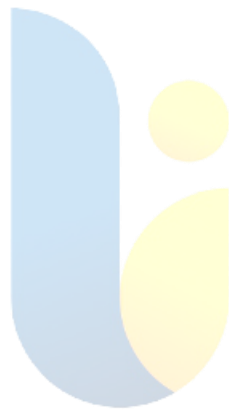


UNIVERSITAS
INABA



DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.



UNIVERSITAS
INABA



PERTEMUAN 2

FAKTOR RESIKO DAN FAKTOR KESUKSESAN PENERAPAN E-GOVERNMENT

Kemampuan yang diharapkan (Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah / Sub-CPMK):

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi Teknologi dan Informasi
2. Mahasiswa mampu memahami manfaat komputer
3. Mahasiswa mampu memahami faktor resiko dan kesuksesan dalam penerapan E-Government
4. Mahasiswa mampu memahami model dan jenis layanan E-Government
5. Mahasiswa mampu memahami arah pengembangan future E-Government berdasarkan pada *real case study* yang ada

Slide – page 1

Dalam sesi ini kita akan membicarakan tentang faktor risiko dan faktor kesuksesan dari implementasi *e-Government*. Kita akan mendiskusikan bagaimana faktor-faktor ini bisa membantu menciptakan berbagai manfaat atau justru membuat implementasi yang ada menjadi gagal. Penting agar kita dapat memahami dengan jelas mengapa kita harus menggunakan *e-Government*. Terdapat banyak peluang kegagalan implementasi dari *e-Government*. Jadi, anda harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dari implementasi *e-Government*.

Slide – page 2

Salah satu manfaat dari kesuksesan implementasi TIK dapat dilihat dari keadaan berikut. Secara tradisional, kita memiliki proses kerja pemerintahan yang menggunakan kertas, serta prosedur yang berorientasi departemen.

Terdapat banyak jalur birokrasi dan masyarakat perlu sering berkunjung ke kantor-kantor pemerintah. Terdapat juga banyak duplikasi dan pemborosan antar departemen yang berbeda dalam hal manajemen sumber daya informasi. Ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, sebagai contoh, ketika masyarakat diminta menunjukkan berbagai sertifikat atau dokumen berupa kertas untuk proses verifikasi.

Slide – page 3

Dengan TIK, proses dengan menggunakan kertas dan prosedur berorientasi departemen ini telah menjadi proses dokumen berbasis elektronik dan prosedur berorientasi layanan. Orientasi ke layanan menyiratkan bahwa para pejabat pemerintah sekarang menjadi lebih peduli kepada masyarakat.

Seperti kita ketahui, birokrasi terkadang digunakan untuk menciptakan begitu banyak masalah, sebagai contoh, mereka berfokus dalam mempertahankan departemen mereka agar kuat dan otonom, dan tidak peduli dengan layanan kepada masyarakat.

E-Government telah menghilangkan masalah-masalah ini, sehingga prosedur dalam suatu departemen menjadi berorientasi layanan. Banyak jalur birokrasi yang berubah menjadi jalur birokrasi tunggal. Kunjungan personal tergantikan dengan kantor *online*, permintaan *online*, pengarsipan *online*, dan partisipasi *online*.

Slide – page 4

Jadi ini adalah manfaat dari implementasi *e-Government*. Dalam konteks metode kerja, dokumen kertas diubah menjadi dokumen elektronik. Prosedur berorientasi departemen menjadi prosedur berorientasi layanan. Sehingga kita cukup menggunakan layanan online dari suatu departemen, tanpa harus datang dan berurusan langsung dengan orang-orang di gedung departemen tersebut.

Dalam konteks reformasi dari layanan masyarakat, banyaknya jalur birokrasi dan kunjungan tatap muka berubah menjadi jalur birokrasi tunggal dan akses *online*. Sebagai contoh, orang tidak perlu melakukan kunjungan untuk memperpanjang SIM, STNK dan lain sebagainya.

Example, Dulu orang yang memiliki properti di New York diharuskan membayar pajak tiap tiga bulan dan apabila orang tersebut sudah tidak tinggal di sana maka dia harus menuliskan cek dan mengirimkan cek pembayaran pajak tersebut.

Tetapi sekarang tidak perlu lagi. Departemen Perpajakan di New York telah memiliki sistem pembayaran secara *online*. Semua bisa mengakses sistem tersebut untuk membayar pajak. Ini begitu nyaman dan memudahkan. Bukan hanya itu, orang yang juga mempunyai beberapa kartu kredit di Bank milik Amerika Serikat dan dapat membayar tagihan tiap bulannya secara *online*.

Dalam konteks manajemen sumber daya, manajemen sumber daya yang tadinya terpisah menjadi manajemen pemerintah terintegrasi. Ini adalah salah satu kunci menuju salah satu



manfaat terbesar dari *e-Government*. Penghematan yang begitu besar. Dan standar departemen akan menjadi standar bagi seluruh pemerintahan.

Slide – page 5

Pertanyaannya, apakah semua perubahan yang dibawa oleh penerapan TIK dalam pemerintahan itu menguntungkan? Jika kita membangun aplikasi TIK berdasarkan permintaan dan dukungan yang kuat dari para pengguna, sesungguhnya tentu akan benar-benar menguntungkan bagi pemerintah, masyarakat atau kalangan bisnis.

Jika ada pertanyaan, “Apakah perbedaan antara prosedur berorientasi departemen dengan prosedur berorientasi layanan?”.

Di masa lalu, setiap departemen memiliki manajemen keuangan, proses audit, bahkan sistem komputer dan jaringan masing-masing, yang berarti setiap departemen memiliki sistemnya sendiri-sendiri.

Di masa depan, setiap sistem akan mencakup keseluruhan, dan organisasi menjadi tanpa batas. Jika anda melakukan hal ini, anda akan menghemat banyak pengeluaran dalam operasi. Ini adalah salah satu alasan yang bagus untuk implementasi *e-Government*. Dalam sistem yang lama, pengguna harus mengulang terus hal yang sama di tiap departemen untuk menerima dokumen atau sertifikat agar bisa menerima layanan. Namun, dalam sistem yang berorientasi layanan, layanan yang diminta bisa didapatkan dengan satu kali proses kerja.

Slide – page 6

Sekarang kita membicarakan keuntungan utama dari *e-Government*. Tujuan dari adanya *e-Government* adalah mengintegrasikan setiap properti dari tiap kementerian seperti basis data, aplikasi, jaringan, perangkat keras, sumber daya dan SDM.

Integrasi menyeluruh akan meningkatkan kinerja layanan pemerintah dalam hal efisiensi, kemudahan pengoperasian, pemberian manfaat kepada masyarakat dan sektor bisnis. Berikut, adalah faktor-faktor kesuksesannya. Sangat penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor tersebut.



Slide – page 7

Salah satu faktor kesuksesan *e-Government* adalah visi, objektif dan strategi yang ditetapkan. Visi, objektif dan strategi harus dirancang dari level paling tinggi, sedangkan implementasi harus berupa proses *bottom-up*.

Jadi, *e-Government* yang sukses membutuhkan visi yang jelas dari para pimpinan. Hampir semua *e-Government* yang ada dibangun oleh Perdana Menteri atau Presiden dari negara tersebut.

Tiap departemen atau daerah tidak bisa melakukannya secara sendiri-sendiri. *E-Government* harus dioperasikan oleh seluruh bagian pemerintah. Disamping visi yang jelas dari pimpinan, anda membutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Dan anda harus memiliki agenda yang jelas.

Sebelum membangun sistem *e-Government*, anda perlu melakukan perubahan peraturan dan perundang-undangan untuk *e-Government*. Peraturan-peraturan seperti: privasi dan isu terkait; perubahan proses bisnis dan sistem informasi; arsitektur teknologi informasi pemerintah dan pendirian sebuah pusat komputer terintegrasi; harus diterapkan terlebih dahulu agar *e-Government* sukses.

Slide – page 8

Struktur organisasi adalah sebuah tantangan. Ketika anda mengimplementasikan *e-Government*, salah satu kesulitan yang ada adalah sulitnya mengubah sebuah birokrasi. Struktur organisasi harus diatur ulang atau disesuaikan dengan *e-Government*.

Untuk itu, anda membutuhkan – jiwa kepemimpinan yang kuat dengan komitmen tinggi; perencanaan, Manajemen TI dan manajemen perubahan; persiapan dan pelaksanaan anggaran; koordinasi dan kolaborasi antar kementerian; pemantauan dan pengukuran kinerja dari *e-Government*. Sebagai tambahan, kemitraan pemerintah – sektor swasta – masyarakat juga harus dibentuk.

Slide – page 9

Faktor kesuksesan selanjutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis yang sudah ada harus diubah sesuai dengan implementasi *e-Government* yang baru. Bagaimana cara anda mengubah sebuah proses bisnis? Anda dapat menggunakan metodologi *Business Process Reengineering* (BPR).



Bagaimana pemerintah mengubah sebuah proses bisnis? Dalam kasus di sektor swasta, mereka memilih untuk melakukan *benchmarking*, mereka melakukan studi banding ke luar negeri atau ke perusahaan lain untuk melihat bagaimana kinerja orang lain.

Anda bisa mengunjungi *Toyota* dan belajar bagaimana mereka dapat memproduksi mobil dengan efisien, lalu anda bisa menerapkannya dalam bisnis anda sendiri. Namun, secara umum pemerintah cenderung tidak mau berubah dan ini merupakan tantangan bagi implementasi *e-Government*. Dalam rangka menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan kalangan bisnis, pemerintah harus mengubah prosesnya agar bisa berjalan dengan lebih efisien.

Mari kita lihat contoh berikut, anda dan saya sering berpergian. Ketika kita di bandara, kita butuh melalui begitu banyak langkah sebelum kita bisa lepas landas. Di beberapa negara, bahkan membutuhkan sampai 10 langkah, sementara negara lain hanya butuh 2 – 3 langkah. Suatu hari saya bertanya pada orang-orang itu, “Kenapa di sini butuh begitu banyak langkah? Beberapa negara hanya butuh 2- 3 langkah saja”. Dan jawaban yang saya terima adalah, “Penduduk negara kami lebih dari seratus juta, mereka butuh pekerjaan”. Itulah sebabnya mereka memiliki sepuluh langkah, karena mereka ingin mempekerjakan lebih banyak orang. Jika langkah tersebut kita potong menjadi hanya 2 – 3 langkah saja, akan kemana para pekerja yang ada?

Selanjutnya adalah Teknologi Informasi. Salah satu kegagalan implementasi *e-Government* adalah pendekatan yang berorientasi teknologi. Sebagai contoh, para insinyur dalam pemerintahan biasanya berkata. “Ada teknologi baru yang muncul, dan kita harus menggunakannya”. Teknologi baru seperti teknologi *mobile* dan teknologi nirkabel sudah melanda pasar. Namun anda harus yakin bahwa teknologi tersebut sudah terbukti baik dan juga telah umum digunakan. Anda harus mempertimbangkan tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan, infrastruktur jaringan, interoperabilitas, standardisasi, dan kemampuan teknis serta kemampuan dari SDM yang ada.

Sebenarnya, TI bukanlah isu yang pertama. Isu yang terpenting adalah kebutuhan para pengguna, yaitu masyarakat dan kalangan bisnis, dalam konteks layanan. Lalu, anda bisa memilih teknologi apa yang akan diterapkan. Di banyak kasus, teknologi dipilih terlebih dahulu, baru kemudian mencoba memberikan aplikasi. Walaupun saya telah bekerja dalam bidang TI lebih dari 35 tahun, implementasi berorientasi TI bukanlah isu utama dari sebuah penerapan yang sukses, anda membutuhkan sebuah pendekatan berorientasi bisnis, lalu melakukan seleksi TI setelah itu.



Satu faktor penting lagi adalah interoperabilitas. Teknologi TI anda harus bisa diinter-operasikan diantara kementerian yang berbeda-beda. Dan standardisasi juga penting karena setiap departemen memiliki standarnya masing-masing. Pemerintahan anda harus memiliki standar yang sama secara menyeluruh, dan hal ini membutuhkan waktu yang lama.

Slide – page 10

Selanjutnya, mari kita melihat faktor risiko dalam penerapan *e-Government*. Sejauh ini kita telah membicarakan manfaat *e-Government* dan faktor-faktor suksesnya. Lalu, apakah faktor risikonya?

Sebuah studi menunjukkan bahwa 35% dari program *e-Government* di seluruh dunia mengalami kegagalan. 50% dianggap setengah gagal, dan hanya 15% yang dianggap berhasil. Ini adalah studi yang dilakukan oleh PBB.

Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa, implementasi dari *e-Government* dapat dengan mudah mengalami kegagalan. Jadi, anda harus memikirkan faktor-faktor untuk menghindari kegagalan dari implementasi *e-Government*, yaitu diantaranya:

1. Kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi publik yang menimbulkan penolakan internal oleh pemerintah. Dalam birokrasi, pemerintah cenderung tidak mau berubah. Jika diubah, mereka takut akan kehilangan pekerjaan. Lalu, bagaimana caranya mereka berubah? Inilah tantangannya. Jika anda tidak memiliki dukungan yang kuat dari mereka, kemungkinan besar anda akan gagal.
2. Kurangnya rencana dan strategi. Anda perlu memiliki visi, strategi dan peta jalan yang jelas. Walaupun anda memiliki visi yang jelas dan perencanaan yang cukup, kemungkinan untuk gagal masih ada.
3. Kurangnya SDM dan kurangnya pembangunan kapasitas institusi dan personel. Proyek *e-Government* adalah proyek nasional, bukan milik kementerian tertentu
4. atau proyek sektor swasta. Ini adalah proyek milik negara, dan di dalamnya; anda butuh teknisi dan insinyur yang cukup dari negara anda. Saya pikir ini adalah salah satu alasan kenapa proyek *e-Government* di India sukses. Banyak sekali insinyur yang berkemampuan tinggi di India. Inilah sebab kenapa mereka berhasil. Pakistan juga memiliki insinyur yang cakap juga, tetapi kurang dalam visi yang jelas dan strategi yang baik. Ini adalah hal yang dibutuhkan oleh proyek *e-Government* untuk sukses. Itulah sebabnya Anda perencanaan pembangunan kapasitas.



Jika Anda pernah berkunjung ke Meksiko. Meksiko memiliki rencana e-Government yang bagus. Mereka membelanjakan jutaan dolar ke perusahaan konsultan dari Amerika Serikat untuk membangun strategi.

Saya tidak tahu perusahaan konsultan yang mana. Perusahaan tersebut datang ke Meksiko, membuat rencana dan peta jalan yang baik. Saya bertanya kepada mereka, “Ini adalah sebuah rencana yang amat baik, Berapakah harga yang harus dikeluarkan untuk ini? Apakah anda memiliki uang untuk hal ini?” Mereka berkata, “Itu bukan masalah kami”. Mereka juga berkata bahwa mereka butuh sedikitnya 2 milyar dolar untuk melaksanakan rencana dan peta jalan tersebut. Dan mereka mencari dana bantuan internasional untuk itu.

Anda membutuhkan uang dan anggaran. Dan anda butuh rencana investasi untuk proyek e-Government anda. Bukan hanya sekedar rencana satu tahun, tetapi rencana untuk 5 sampai 10 tahun mendatang. Anda akan menyebar anggaran yang ada sepanjang periode tersebut, dan mencari tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan setiap tahunnya. Inilah sebabnya mengapa rencana investasi amat penting.

5. Kurangnya vendor sistem dan TI sangat terkait dengan kapasitas SDM yang tidak cukup.
6. Ketidakmatangan teknologi sebagai akibat terlalu menekankan teknologi atau penerapan e-government yang berorientasi teknologi. Anda perlu memiliki pendekatan berorientasi bisnis dan layanan. Anda harus yakin bahwa sistem yang anda gunakan adalah sistem TI yang terbukti baik.
7. Pengimplementasian yang terburu-buru tanpa persiapan dan pengujian yang cukup. Anda bisa saja membawa beberapa piranti lunak internasional untuk diaplikasikan dalam proyek e-Government anda Namun anda harus yakin bahwa sistem tersebut cocok dan pas dalam proses pemerintahan dan budaya anda.

Slide – page 11

Sekarang, kita membahas masa depan *e-Government*. Apa saja rencana *e-Government* di masa depan? Ketika anda sudah mengimplementasikan *e-Government*, anda pikir telah selesai semuanya? Tidak ada lagi rencana selanjutnya?

Tentu tidak. Sejalan dengan perkembangan TI yang berkelanjutan dan terus berevolusi. *e-Government* perlu diperbaharui seiring dengan teknologi. *E-government* didasarkan pada teknologi informasi yang saat ini anda gunakan. Jika TI berganti, maka *e-Government* yang ada juga perlu diperbarui. Tahap-tahap *e-government* adalah sebagai berikut:



Tahap 1 – Otomasi, setiap departemen membangun basis data dan layanan yang terpisah. Ini terjadi pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Saya pikir sebagian besar negara telah melewati tahap ini.

Tahap 2 – Layanan Online, mungkin ini masih dalam tingkat departemen. Jaringan komputer dibangun pada periode ini.

Tahap 3 – Integrasi, menyediakan konvergensi, koneksi orang ke orang dan layanan satu atap. Ini mungkin kasus saat ini. Menurut anda, sebagian besar negara Asia dan Afrika sedang berada di tahap berapa? Dua atau tiga, mungkin beberapa negara sudah berada pada tahap tiga, tetapi kebanyakan masih pada tahap dua.

Tahap 4 – *Ubiquitous* (atau ada di mana-mana), ini menyediakan konvergensi total, objek ke objek dan layanan yang seamless, serta layanan non-stop. Sebagai contoh, seorang bayi lahir, lalu anda mendapatkan akte kelahiran dari rumah sakit dan pergi ke kantor pemerintahan untuk mendaftarkan kelahiran bayi tersebut. Ini adalah *one-stop service*, Dalam layanan *yang zero-stop*, rumah sakit tidak menerbitkan akte kelahiran kepada anda, namun mengirimkannya langsung kepada pemerintah untuk didaftarkan.

Slide – page 12

Ketika anda membeli mobil, anda mendapatkan semua suratnya dari penjual. Lalu anda pergi ke tempat pengurusan kendaraan bermotor (atau Samsat) untuk mendaftarkannya. Ini adalah *one-stop service*.

Dalam kasus *zero-stop service*, penjual mengirim semua surat dokumen kepada pemerintah atas nama anda. Akan ada lebih banyak contoh kasus *zero-stop service*.

Slide – page 13

Di masa depan, layanan pemerintah akan tersedia secara *real time* oleh sektor swasta, seperti contoh kasus rumah sakit dan penjual kendaraan bermotor sebelumnya, dengan memanfaatkan infrastruktur TI nasional yang canggih dan menghubungkan pemerintah dengan swasta.

Orang tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintah. Sebagai contoh – Pindah rumah, kelahiran, membuat NPWP, bayar pajak, beli mobil atau kehilangan pekerjaan. Saya pikir ini adalah hal yang bagus. Jika pemerintah tahu saya kehilangan pekerjaan, mungkin mereka bisa merelokasikan pekerjaan untuk saya.

Slide – page 14

Dalam sesi ini, telah dibahas bahwa salah satu hal utama adalah berubah dari tingkatan tiap kementerian ke tingkatan menyeluruh, yang berarti juga pergeseran dari orientasi departemen menuju orientasi layanan. Semua orang bisa mengakses layanan yang ada kapan saja di mana saja.

Anda tidak perlu lagi mengajukan tunjangan pengangguran. Pemerintah akan mengirimkannya keesokan harinya. Pemerintah seharusnya menyediakan layanan seperti ini. Pemerintah tidak mengontrol atau mengelola masyarakat, tetapi memberikan layanan. Disinilah kontribusi *e-Government*.

Slide – page 15

Selanjutnya, kita akan membahas model-model *e-Government*. Politisi sebaiknya tidak ikut campur dalam penyusunan kebijakan dan strategi, serta implementasi dari *e-Government*. Namun, anda harus melihat politisi sebagai pengguna, yang berarti mereka juga butuh banyak informasi dan data dari sistem pemerintahan.

Anda perlu melihat dari sudut pandang ini daripada menganggap bahwa mereka terlibat secara politis. Para pemangku kepentingan perlu didefinisikan sebagai pengguna dari data dan informasi pemerintah.

Slide – page 16

Terdapat delapan macam model dari *e-Government*. Pertama adalah G2C dan C2G, ini adalah pertukaran yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menawarkan layanan kepada masyarakat, sebagai balasannya masyarakat menawarkan dan bertukar informasi kepada dan bersama pemerintah.

Selain itu juga terdapat G2B dan B2G, yaitu antara pemerintah dan kalangan bisnis.



Slide – page 17

Lalu ada juga G2E, apa itu G2E? G2E adalah *Government to Employee* (Pemerintah kepada Pegawai). Setiap pegawai pemerintah adalah *stakeholder*. Apakah anda bisa mengenal layanan apa sajakah yang termasuk dalam model G2E? Diantaranya adalah perencanaan karir dan pelatihan; karena pegawai pemerintah memerlukan perhatian terhadap jalur karir dan pembangunan kapasitas mereka.

Apakah G2N? G2N adalah *Government to Nonprofit* (Pemerintah kepada organisasi Nirlaba). Dibutuhkan banyak sekali komunikasi antara dua pihak ini. Komunikasi dari organisasi nirlaba kepada pemerintah sangat penting karena mereka adalah salah satu dari *stakeholder*.

Slide – page 18

Ini adalah model dari *e-Government*. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, dalam tingkat ini kita dapat menyebutnya sebagai “sistem kemitraan internal *e-Government*”. Internal karena ini adalah proses *back-office*.

Selain internal juga terdapat kemitraan eksternal *e-Government*. Ini adalah gambaran keseluruhan yang bagus dari *e-Government*. Anda bisa lihat hubungan antara G2C, C2G, G2G dan organisasi nirlaba.

Ini adalah area prioritas dari *e-Government* di negara-negara berkembang. Kita telah membicarakan mengenai model-model *e-Government*, dan selanjutnya kita akan membicarakan tentang apa saja prioritas kita ketika mengimplementasikan *e-Government*. Sangat penting bagi kita untuk memastikan area prioritas yang harus diimplementasikan *e-Government* karena terdapat banyak sekali area.

Slide – page 19

E-Mexico, memiliki rancangan yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai contoh di sini, terlepas apakah mereka sukses atau tidak.

Prioritas mereka adalah konektivitas, konten dan sistem. Sistem di sini berarti keamanan, PKI (*Public Key Infrastructure*) dan integrasi. Konten berarti layanan portal di tingkat kementerian yang terhubung ke pemberian layanan kepada masyarakat. Aplikasi utama mereka adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Kebanyakan negara ingin membuat infrastruktur terlebih dahulu, lalu membangun konten sesudahnya, mengingat jika anda memiliki konten tanpa infrastruktur, masyarakat tidak bisa mengakses konten tersebut. Anda perlu memastikan bahwa setiap orang bisa terlayani tidak hanya melalui satu jalur, tetapi bisa dari banyak jalur (atau multi kanal).

Slide – page 20

Berikut adalah contoh kasus dari Kepulauan Fiji dan Solomon, yang sangat menarik. Mereka ingin membangun sebuah sistem *e-Government*, tetapi di beberapa pulau tidak tersedia listrik. Jika mereka tidak memiliki listrik, bagaimana cara mereka menghubungkan *e-Government*? Tentunya menarik untuk dilihat.

Slide – page 21

Proyek *e-Government* akan membuat bisnis pemerintah secara *online*, agar masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah secara *online*.

Walaupun mereka tidak memiliki tenaga listrik, tetap mereka perlu mengimplementasikan *e-Government*. Jadi hal pertama yang mereka fokuskan adalah masalah konektivitas.

Slide – page 22

Mereka ingin memiliki fasilitas seperti – *e-learning* untuk guru, *e-scholarship*, administrasi penjara dan basis data kriminalitas. Namun, tantangannya adalah koneksi.

Slide – page 23

Berikut adalah contoh bagus tentang cara membangun koneksi di pulau terpencil. Ini adalah pelajaran yang bisa diambil dari *PFNet*. Ada sebuah desa terpencil bernama *Sasamunga* di pulau *Choiseul*, sekitar 1000 mil dari *Honiara*, ibukota Kepulauan Solomon. Desa tersebut tidak memiliki listrik dan tidak ada sambungan telepon.



Slide – page 24

Kepulauan *Sasamunga* memiliki listrik bertenaga matahari sehingga masyarakat bisa menggunakan komputer. Dari *Sasamunga* ke *Honiara*, mereka menggunakan transmisi radio gelombang pendek.

Terdapat banyak pusat *email* di *Sasamunga*, orang pergi ke sana dan menulis *email* dan surat tersebut ditransmisikan ke *Honiara*. Sehingga, terjadi koneksi yang tidak terputus di kepulauan, dan orang bisa berkirim surat di sana.

Di Bhutan, terdapat banyak pegunungan, sehingga di beberapa tempat sulit untuk memiliki listrik seperti halnya di kepulauan. Contoh ini sangat bagus untuk menunjukkan cara membangun koneksi dan menyediakan layanan pemerintah. PBB dan organisasi-organisasi nirlaba telah menolong banyak negara kepulauan ini untuk membangun e-Government. Dana yang dibutuhkan sekitar 2000 dolar.

Slide – page 25

Ada sebuah contoh lagi dari Bangladesh.

Satu cara dari Bangladesh dalam membangun konektivitas adalah dengan *Community Information Center* (CIC-atau Pusat Informasi Masyarakat). Yang merupakan model berorientasi keuntungan. CIC dioperasikan oleh operator telekomunikasi terbesar Bangladesh yang bernama *Grameen Phone*.

Perusahaan ini mendirikan sekitar 16 buah CIC pada Februari 2006 sebagai *pilot project*. Karena berorientasi laba, maka setiap orang yang menggunakan layanan ini harus membayar sejumlah uang. Ini menunjukkan bahwa jika pemerintah tidak dapat memiliki sebuah sistem jaringan ke seluruh wilayah negara, anda bisa mendayagunakan sektor swasta untuk menyediakan layanan tersebut.

Butuh waktu lama untuk mencakup seluruh wilayah negara. Korea adalah negara kecil, bahkan lebih kecil dari sebuah negara bagian di India. Inilah sebabnya Korea dapat memiliki koneksi serat optik di seluruh wilayahnya. Namun, negara luas seperti Indonesia, Meksiko, Rusia dan Cina membutuhkan waktu yang lama untuk itu. Untuk negara-negara yang luas, model yang berorientasi kepada laba, mungkin adalah model yang cocok.



Slide – page 26

Cara kedua adalah apa yang disebut dengan *Rural ICT Centre* (RIC – atau Pusat TIK Pedesaan), yang dijalankan oleh *Digital Equity Network* (DEN), yang merupakan konsorsium multi donor. Tiap RIC memiliki infrastruktur fisik dan fasilitas TIK dasar seperti telepon, komputer, *printer*, *scanner*, koneksi internet, dan kamera digital. Pada dasarnya RIC menyediakan informasi pasar pertanian atau peternakan daerah.

Slide – page 27

Contoh yang lain adalah RTC atau *Rural Technology Centre* atau Pusat Teknologi Pedesaan.

RTC menyediakan teknologi yang sesuai dan terjangkau untuk mengakses layanan TIK.

Pada dasarnya RIC adalah untuk kalangan bisnis.

Yang terakhir adalah ILC atau *Internet Learning Centre* (atau Pusat Belajar Internet).

Anda bisa membacanya sendiri, tapi yang saya ingin tekankan dari empat kasus ini yaitu jika pemerintah mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran dan sumber daya untuk membangun infrastruktur jaringan yang menyeluruh, terdapat cara alternatif untuk menyediakan layanan. Anda tidak perlu hanya menunggu pemerintah untuk bertindak terlebih dahulu.

Slide – page 28

Coba pikirkan area prioritas dari implementasi *e-Government* dari sudut pandang *stakeholder* seperti masyarakat, kalangan bisnis, investor asing, pegawai pemerintah, pemimpin perserikatan dan organisasi nirlaba.

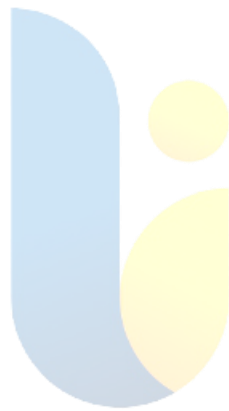


DAFTAR PUSTAKA

Inpres No. 3 tahun 2003

Perpres No. 95 Tahun 2018

The Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development
(APCICT)



UNIVERSITAS
INABA

